

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). Fraud prevention initiatives in the Nigerian public sector: Understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 527–544.
- Abidin, Z. (2011). *Psikologi Korupsi dan Pembentukan Karakter Bangsa*. <https://antikorupsijateng.wordpress.com/2011/08/26/psikologi-korupsi-dan-pembentukan-karakter-bangsa/>
- ACFE. (2016). *Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse*. Association of Certified Fraud Examiners.
- Aksa, A. F. (2018). Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(4), 1–17.
- Alatas, S. H. (1981). *Sosiologi Korupsi*. LP3ES : Jakarta.
- Albrecht, W. Steve, et al. (2012). *Fraud Examination (4th Editio)*. SouthWestern Cengage Learning.
- Alex S. Nitisemito. (2004). *Manajemen Personalia*. Ghalia Indonesia.
- Anggriawan, E. F. (2014). *Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional Dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Fraud (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Diy)*. 3(2).
- Areros, W. A. (2015). Pengaruh Pengawasan Terhadap Peningkatan Efektivitas Birokrasi(Studi Kasus Tentang Pelayanan Birokrasi di Kantor Sekretariat Walikota Manado). *Jurnal Acta Diurna*, 4(3), 1–8.
- Ariesto Hadi Sutopo & Adrianus Arief. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Prenada Media Group.
- Artiningrum, P., Kurniasih, A., & Nugroho, A. (2013). *Etika dan perilaku profesional sarjana*. Graha Ilmu.
- Bologna & Linqisdt. (1995). *Fraud Auditing and Forensic Accounting: New Tolls and Techniques*. John Wiley & Sons, Inc.
- G.Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells (1993). *Handbook of Corporate Fraud*. Boston:Butterworth-Heinemann
- BPK RI. (2014). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014*.
- BPKP. (2002). *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. BPKP.

- BPKP. (2008). *Fraud Auditing* (P. BPKP (ed.); 5th ed.). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Sertifikasi JFA.
- Brandon, J. R. (2013). *Whistle-blowing*. Cambridge University.
- Budiningsih. (2005). *Model Discovery Learning*. Pustaka Mandiri.
- Cahyaningrum, C. D., Ayuananda, T. I., & Arifin. (2017). Whistleblowing: studi eksperimental dalam kejujuran dan tekanan ketaatan. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 143–158.
- Candra, R. D. (2019). *ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KORUPSI OLEH APARAT PEMERINTAH (Studi Kasus pada Pelaku Korupsi yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Masyarakat di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta)*. 58.
- Cekpajak.go.id. (2021). *Arti Kata deteksi*. <https://cekpajak.co.id/blog/arti-kata-deteksi-adalah/>
- CNNIndonesia.com. (2017). *Menelisik Cara Kerja BPK dalam Memeriksa Keuangan Negara*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170731084819-84-231374/menelisik-cara-kerja-bpk-dalam-memeriksa-keuangan-negara>
- Coenen, T. (2012). Red Flags of Fraud. *Essentials of Corporate Fraud*, 47–69.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions*. Sage Publications.
- Creswell, John W. (2009). Mixed methods procedures. In *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design, Qualitatives, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition)*. Sage Publications.
- Dailibas, D. S. (2013). *Panduan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah* (Cetakan ke). PPM Manajemen.
- de Lorenzo, J. (1993). *Forensic Accounting* (I. the Black (ed.); Number 2). Volume 63.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fuqoha. (2015). *Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional*. Universitas Serang Raya.
- Gerry. (2013). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah*. Universitas Negeri Padang.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). *Competing paradigms in qualitative research*. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp.

105-117). Sage Publications.

- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(1), 163–180.
- Hidayat, A. S., & Azhar, A. (2016). Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Persepsi Mahasiswa. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 15(1), 2320–2371.
- Hormati, G. A., & Pesudo, D. A. A. (2019). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi dan Kemampuan Terhadap Kecenderungan Aparatur Sipil Negara dalam Melakukan Kecurangan Akuntansi Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 172–190.
- Kabupaten Semarang. (2020). *Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang*.
- Kartika, A. R. (2015). *Penggunaan Metode Red Flags Untuk Mendeteksi Kecurangan Dalam Perusahaan* (Vol. 13, Issue 3). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Andi.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing System - WBS)*. 3.
- Latan et. al. (2018). Whistleblowing intentions among public accountants in indonesia. 2018.
- Lincoln, Y.S., & G. E. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Mary-Jo Kranacher, Richard Riley, J. T. W. (2010). *Forensic Accounting and Fraud Examination*. Wiley.
- Merdeka.com. (2019). *KPK Sebut Jateng Penyumbang Perkara Korupsi Keempat Di Indonesia*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-sebut-jateng-penyumbang-perkara-korupsi-keempat-di-indonesia.html>
- Miqdad. (2008). *Mengungkap Praktek Kecurangan (Fraud) pada Korporasi dan Organisasi Publik Melalui Audit Forensik*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research Methods*. Sage Publicatios.
- Nasution. (2009). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara.

- Nasional.kompas.com. (2013). *Kepolisian dan DPR, Lembaga Paling Korup di Indonesia*. <https://nasional.kompas.com/read/2013/07/09/2231272/Kepolisian.dan.DPR.Lembaga.Paling.Korup.di.Indonesia>.
- Nenda Marliani. (2019). *Pengaruh Financial Stability, Nature Of Industry, Ratonalization, Dan Change In Director Terhadap Financial Statement Fraud (Studi Empiris Pada Perusahaansub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)*. Universitas Sangga Buana YPKP.
- news.detik.com. (2014). *Selama Jadi Buron Kasus Korupsi, Mantan Bupati Semarang Mengajar Mengaji*. <https://news.detik.com/berita/d-2566208/selama-jadi-buron-kasus-korupsi-mantan-bupati-semarang-mengajar-mengaji>
- News.detik.com. (2017). *Kasus Alkes, Ratu Atut Didakwa Rugikan Negara Rp 79 Miliar*. <https://news.detik.com/berita/d-3441349/kasus-alkes-ratu-atut-didakwa-rugikan-negara-rp-79-miliar>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Universitas Veteran Bangun Nusantara.
- Octaviani. (2017). *Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara*. Universitas Sam Ratulangi.
- Peltier-Rivest, D. (2018). A model for preventing corruption. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 545–561.
- Perbup Kabupaten Semarang. (2019). *Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2019*.
- PermenPAN-RB Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 /PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, (2008).
- PP Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Prabowo, H. Y. (2016). Sight beyond sight: Foreseeing corruption in the Indonesian government through behavioral analysis. *Journal of Financial Crime*, 23(2), 289–316.
- Prabowo, H. Y., Sriyana, J., & Syamsudin, M. (2018). Forgetting Corruption: Unlearning the knowledge of corruption in the Indonesian public sector. *Journal of Financial Crime*, 25(1), 28–56.
- Putra, E. T. (2018). Analysis of Factors That Affect the Loyalty of Employee of Pt.

- Gersindo Minang Plantation Pasaman Barat. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 6(3), 314–321.
- Putri, D. A., & Nihayah, Z. (2019). The Effect Of Moral Integrity, Lifestyle And Organizational Culture On Anti-Corruption Intention. *TAZKIYA: Journal of Psychology*, 5(2), 289–300.
- Reni Maralis dan Aris Triyono. (2019). *Manajemen Resiko* (P. D. SE.MM (ed.)). DeepPublish.
- Republika.co.id. (2012). *KPK Sorot Korupsi Biaya Perjalanan Dinas Pejabat*. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/m4o9w3/kpk-sorot-korupsi-biaya-perjalanan-dinas-pejabat>
- Rodiyah, S. (2015). *Pengaruh Sifat Machiavellian, Lingkungan Etika dan Personal Cost terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- RRI.co.id (2020). *Dampak Kerugian Negara-Ekonomi Terhadap Perbuatan Tercela Korupsi*. <https://rri.co.id/nasional/peristiwa/941777/dampak-kerugian-negara-ekonomi-terhadap-perbuatan-tercela-korupsi>
- Sa'id, S. U., & Abas Azmi, K. S. (2020). Challenges of combating fraudulent practices: evidence from Nigerian public sector. *Journal of Financial Crime*.
- Sembiring, Y. N. (2015). Peranan Pemeriksaan Keuangan (Auditing) Untuk Memenuhi Akuntabilitas. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 1(3), 69–81. <http://www.jurnalmudiraindure.com/wp-content/uploads/2015/10/Peranan-Pemeriksaan-Kuangan-Auditing-Untuk-Memenuhi-Akuntabilitas.pdf>
- Setiadi, W. (2018). *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. m Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2011). Fraud Auditing and Forensic Accounting, Fourth Edition. In J. Wiley (Ed.), *Fraud Auditing and Forensic Accounting, Fourth Edition* (fourth). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118269183>
- Situmorang, V. M. (1998). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta.
- Soimah. (2014). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara*. Universitas Bengkulu.
- Solopos.com. (2019). *Jumlah Korupsi di Jateng Peringkat Kedua, Ini Data ICW*. <https://www.solopos.com/jumlah-korupsi-di-jateng-peringkat-kedua-ini-data-icw-970791>

- Strauss, A. dan J. C. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata langkah dan Teknik-Teknik Teoritisi Data*. Pustaka Pelajar.
- Sudiyono, A. (2011). *Evaluasi Pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Suprajadi, L. (2009). Teori Kecurangan, Fraud Awareness dan Metodologi untuk Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Bina Ekonomi*, 13(2), 52–58. <https://doi.org/10.26593/be.v13i2.722.%p>
- Tagar.id. (2020). *5 Daerah Jawa Tengah Terbanyak Kasus Korupsi*. <https://www.tagar.id/5-daerah-jawa-tengah-terbanyak-kasus-korupsi>
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Auditor Investigatif* (Edisi ke-2). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).
- Tuanakotta, T. M. (2012). *Forensic Accounting and Investigative Audit*. Salemba Empat.
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*. Salemba Empat.
- Tuanakotta, T. M. (2017). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Salemba Empat.
- Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).
- UU Republik Indonesia. (2001). *Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 1–20.
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (2004).
- UU Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara* (pp. 1–105).
- Wardhani, R. (2012). *Faktor-faktor Penyebab dan Konsekuensi dari Kecurangan Pelaporan Keuangan (Fraud)*.
- Wiharti, R. R., & Novita, N. (2020). Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi dalam. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 115–125.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Wulandari, S. (2014). *Determinan Terjadinya Fraud di Instansi Pemerintahan (Persepsi Pada Pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi NTB)*. Universitas Brawijaya Malang.
- Wuysang, R. V. O., Nangoi, G., & Pontoh, W. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan

Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 7(2), 31–53.